



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



Talkshow:

Program Perbendaharaan Menyapa - Universitas Airlangga

“Peningkatan Efektivitas Belanja Menuju SDM Unggul Indonesia Maju”

Disampaikan Oleh:

Sudarso

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Keuangan



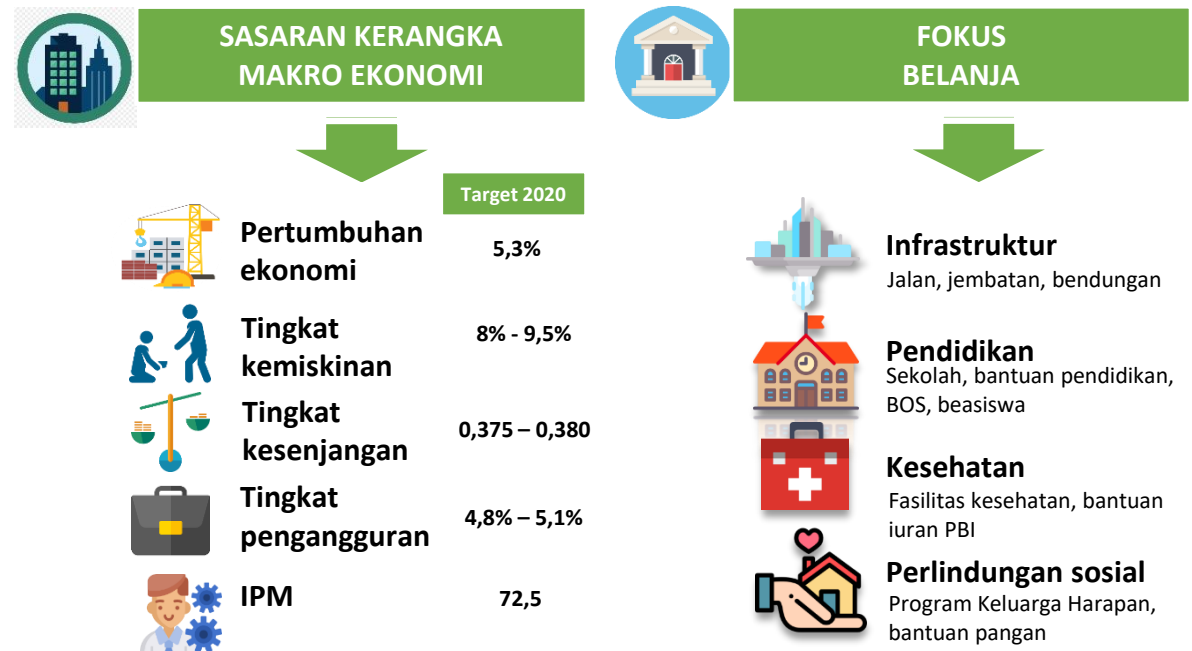
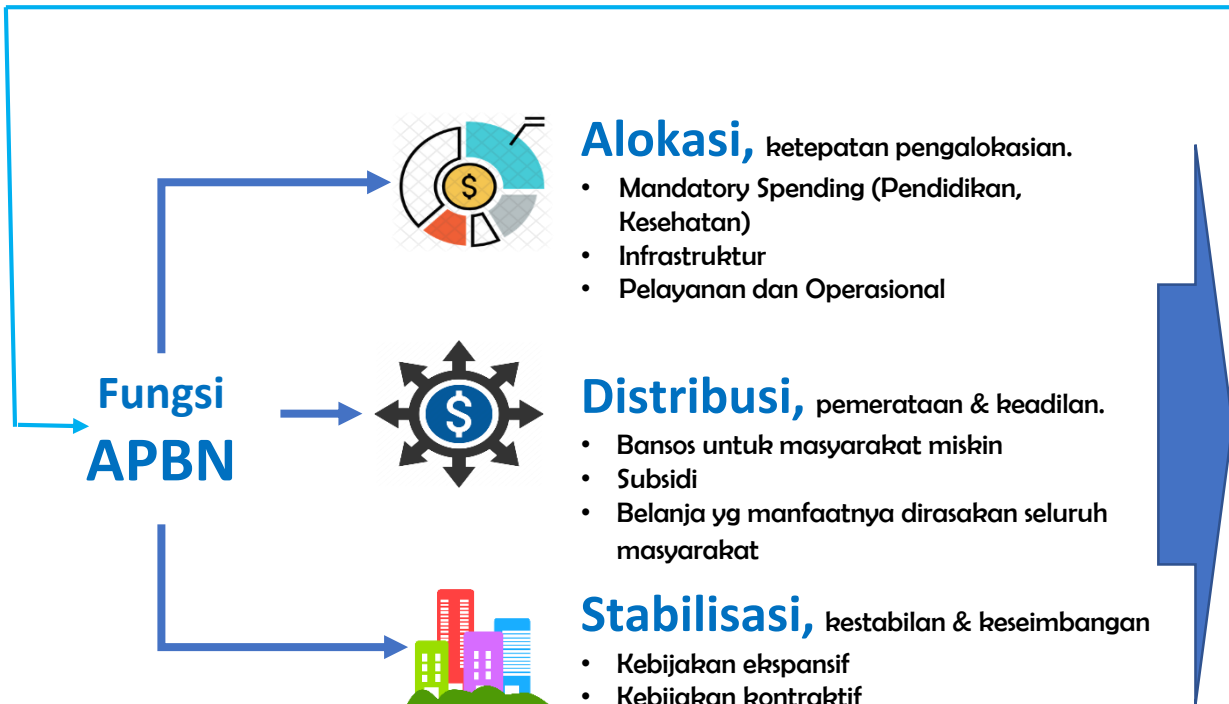
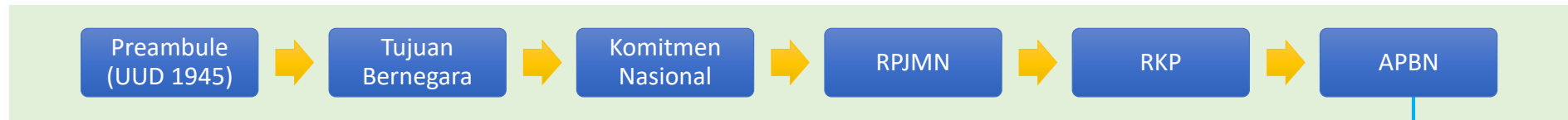
Universitas Airlangga, 23 Oktober 2019

Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur

Anggaran Pendapatan Belanja Negara



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah menetapkan sasaran target pembangunan yang diwujudkan melalui berbagai focus belanja. Dalam lima tahun terakhir Pemerintah berfokus pada program pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

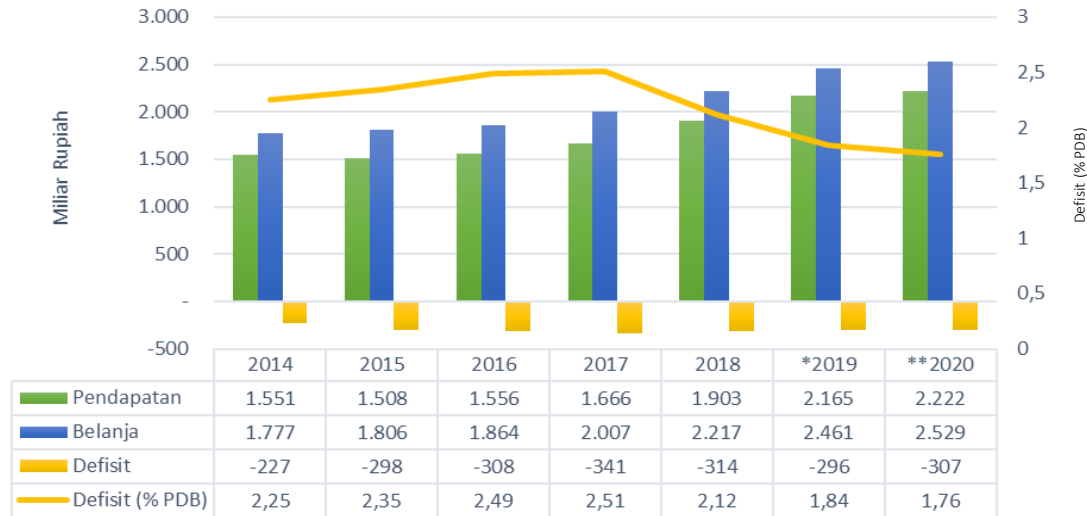


APBN Meningkatkan Dari Waktu ke Waktu

Peranan APBN Membiayai Belanja Penting

APBN mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dengan posisi Rp 757 Trilyun (2007) dan meningkat sampai dengan Rp 2.461 Trilyun (2019), atau meningkat. APBN digunakan untuk membiayai berbagai belanja strategis nasional utamanya infrastruktur, disamping untuk penyediaan pelayanan dan operasional Pemerintah

Perkembangan APBN

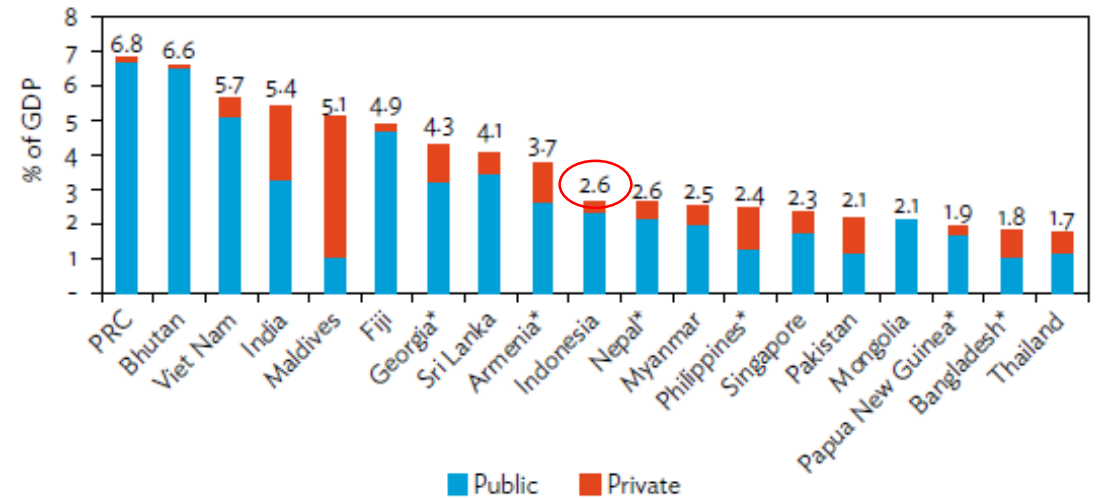


Source: Kemenkeu

Pengelolaan yang prudent, APBN diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian. APBN dari tahun ke tahun semakin besar nominalnya dan digunakan untuk:

1. Pembangunan infrastruktur
2. Mandatory spending (Pendidikan, Kesehatan)
3. Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah
4. Operasional dan layanan

Urgensi Investasi Infrastruktur



Source: ADB South Asia Working Paper Series

Investasi infrastruktur di negara negara di kawasan Asia berkisar pada level 2% s.d 7% dari PDB. Berdasar perhitungan ADB, kecuali untuk China, **rata rata infrastructure gap negara negara kawasan Asia mendekati 5% PDB**. Kurangnya infrastruktur akan berdampak pada kelambatan perekonomian di masa mendatang. Untuk itu Indonesia perlu mengejar ketertinggalan infrastrukturnya.

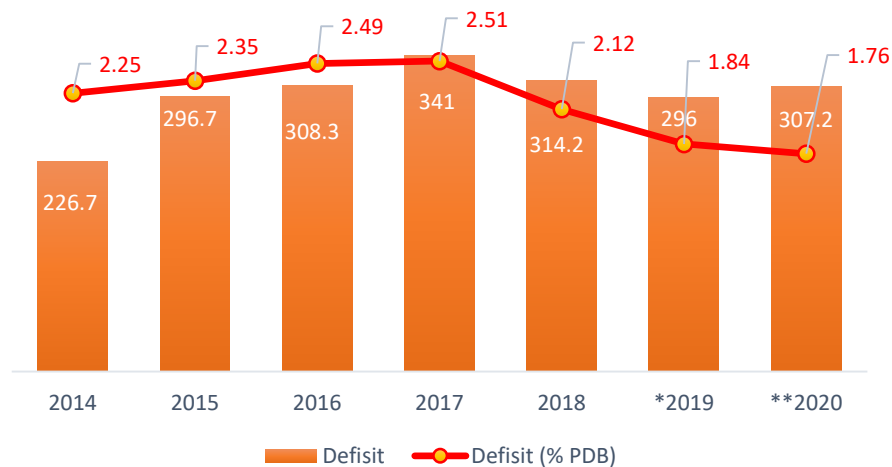
Sustainability Rules:

(1) Pengendalian Defisit

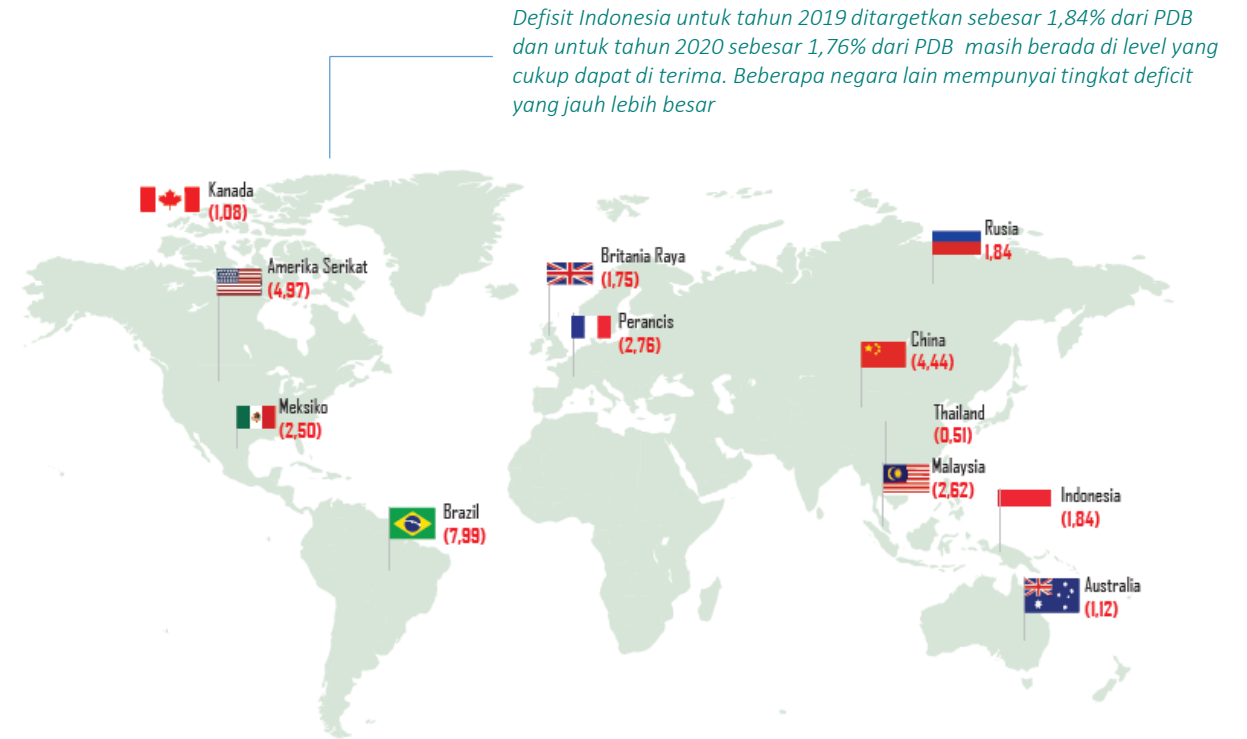
Belanja Pemerintah mempunyai peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai komponen pembentuk Pendapatan Nasional (PDB). Pemerintah mengambil kebijakan ekspansif dengan tujuan untuk menjadikan belanja sebagai katalisator dan pendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier yang diciptakan.

“Untuk mengakomodasi kebijakan fiskal ekspansif tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan defisit dan mencari sumber pembiayaan”.

Rules (1): Defisit tidak boleh melebihi 3% PDB



Defisit Indonesia untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 1,84% dari PDB dan untuk tahun 2020 sebesar 1,76% dari PDB. Defisit Anggaran sebesar 1,76% PDB ini diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian. Rasio defisit terhadap PDB tahun 2020 terendah dalam lima tahun terakhir



Defisit Indonesia untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 1,84% dari PDB dan untuk tahun 2020 sebesar 1,76% dari PDB masih berada di level yang cukup dapat di terima. Beberapa negara lain mempunyai tingkat deficit yang jauh lebih besar

Kondisi perekonomian dunia saat ini masih dihadapkan pada berbagai kondisi ketidakpastian seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China, atau perlambatan ekonomi di banyak negara di dunia. Hal tersebut dapat berdampak pada pendapatan perpajakan dan makroekonomi belanja sehingga dapat berpotensi pada penurunan pendapatan perpajakan dan memperbesar defisit belanja

Sustainability Rules: (2) Pembiayaan (Utang) Yang Prudent

Pembiayaan Utang digunakan untuk membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN dan BLU, serta pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda, utamanya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Pembiayaan anggaran ini diperoleh dari pembiayaan utang baik dari penerbitan SBN, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri.

Penurunan Pembiayaan Utang sebagai upaya menjaga kesinambungan fiskal:

Hati Hati

1. pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal
2. menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan

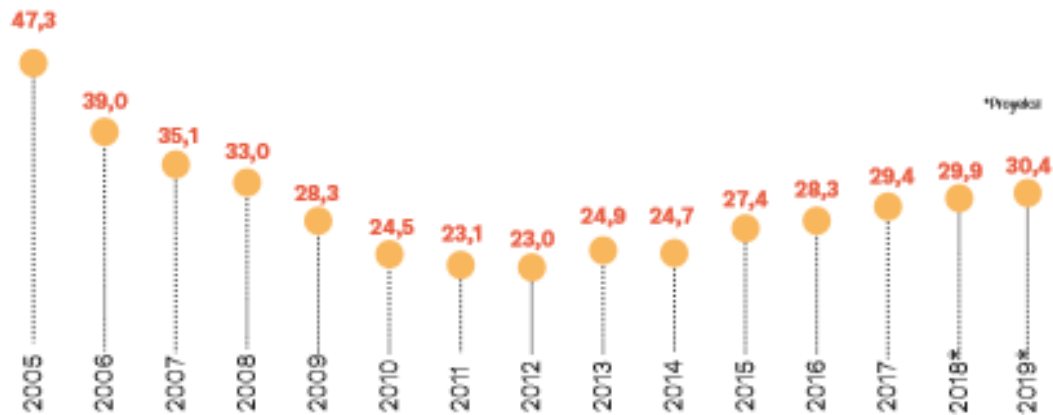
Efisiensi, terciptanya efisiensi biaya utang

Produktif, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif

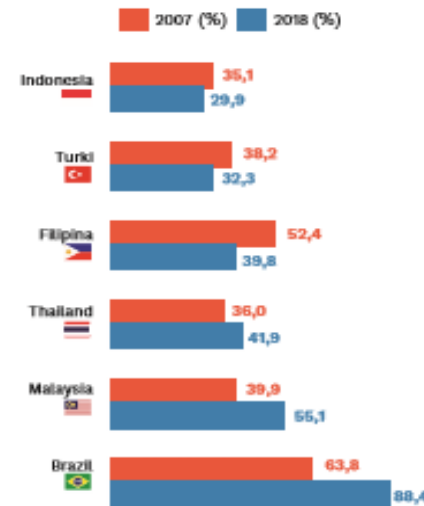
Rules:

Outstanding Utang tidak boleh melebihi 60% PDB

Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2005-2018 persen (%)



Catatan: Dalam Undang-undang Keuangan Negara, diamanatkan batas maksimal 60% dari PDB



Apakah utang pemerintah berdampak negatif bagi masyarakat?

Utang adalah hal yang baik apabila dikelola dengan baik. Setiap rupiah utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang.

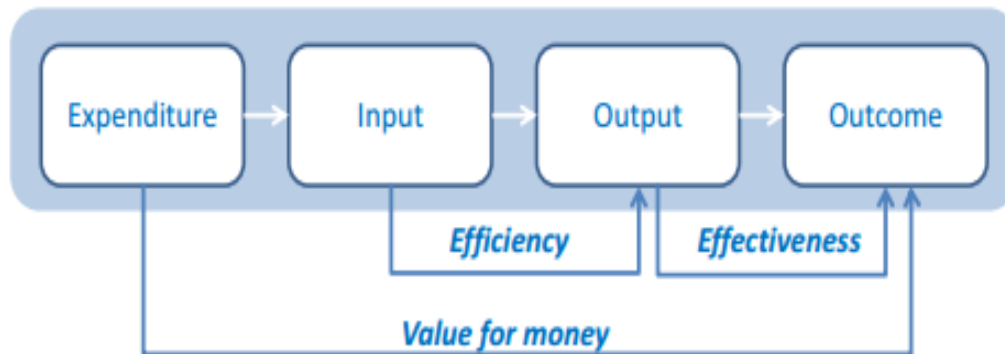
Peningkatan Kualitas Belanja

Spending Better

Setiap rupiah utang harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan bermanfaat untuk masyarakat. Setiap rupiah pengeluaran negara harus dikawal dan dikelola dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan. Optimalisasi penggunaan belanja dengan tercapainya *value for money* perlu dipastikan, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. *Spending better*, yaitu belanja negara dilakukan secara efisien namun dengan output dan outcome terhadap ekonomi yang optimal (efektif)

“ Saya melihat dalam mengelola APBN, ada optimalisasi yang bisa kita push lagi. Yaitu the concept of value for money. Berapa nilai yang harus kita dapat dengan anggaran belanja sekian, ”
(Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI)

Concepts of value measurement for public action



European Commission (EC)

- i) *to what extent the results of an intervention were generated by the actions carried out (link output-outcome)*
- ii) *efficiency, i.e. assessing to what extent output was generated with an adequate level of input*
- iii) *sustainability*
- iv) *positive or negative side effects*

Mendorong belanja negara yang:

- **Efisien** - mencapai nilai maksimal anggaran belanja sesuai dengan skala, cakupan dan risiko
- **Efektif** – mencapai tingkat outcome yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mencakup biaya, kualitas dan manfaat
- **Ekonomis** - mencapai kebutuhan outcome sedangkan menghindari pemborosan dan meminimalkan biaya

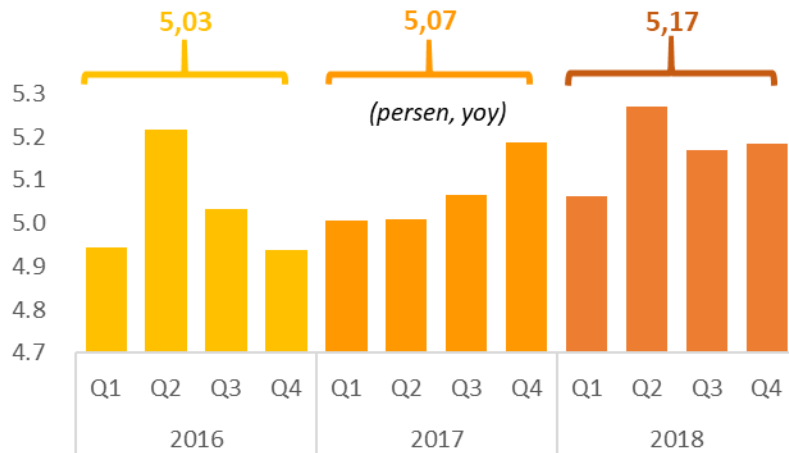
Peningkatan Kualitas Belanja

Capaian Makro Fiskal

Berdasarkan hasil reviu, Pemerintah mengambil kebijakan pendukung dalam rangka mencapai target sasaran dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta membuka lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

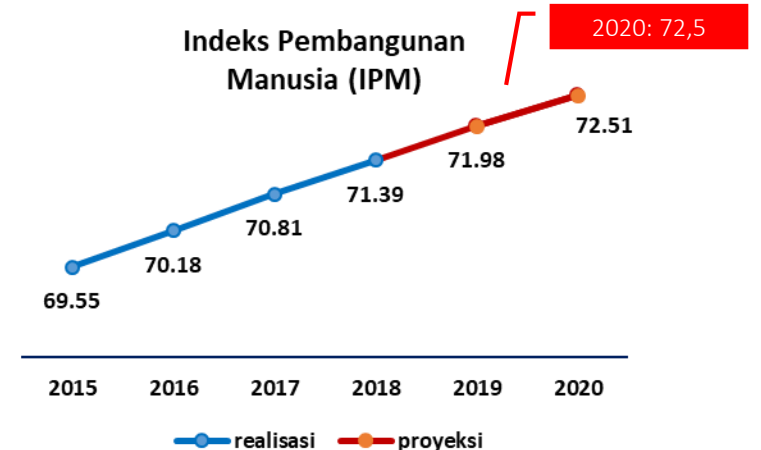
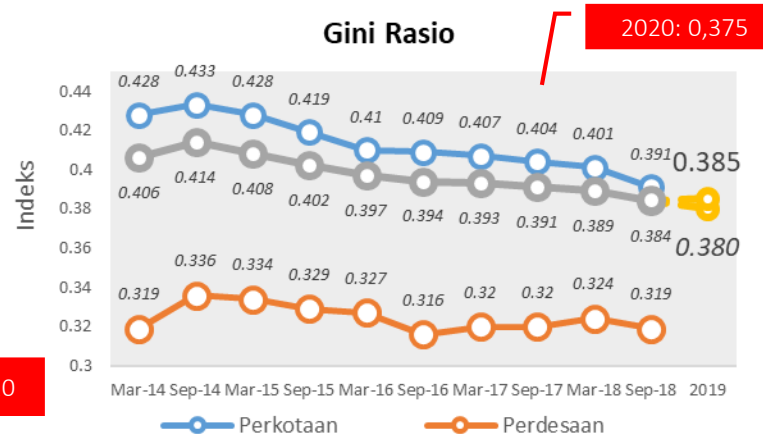
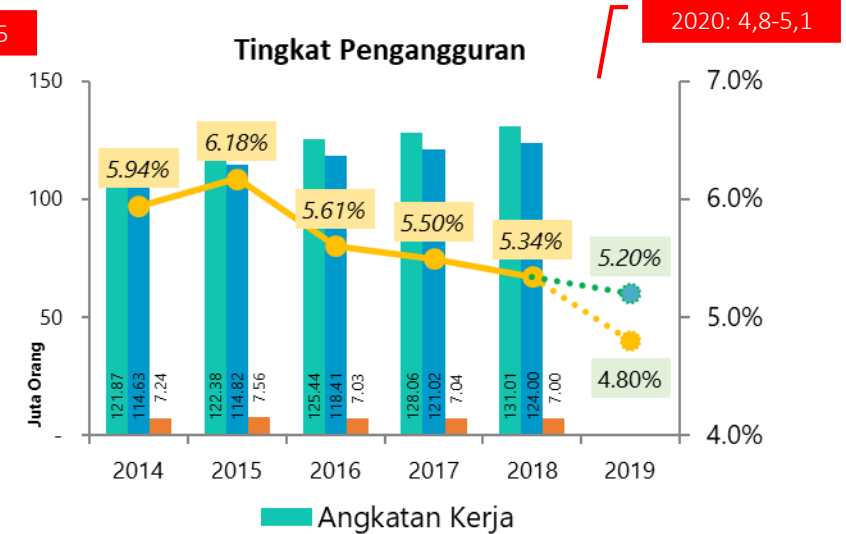
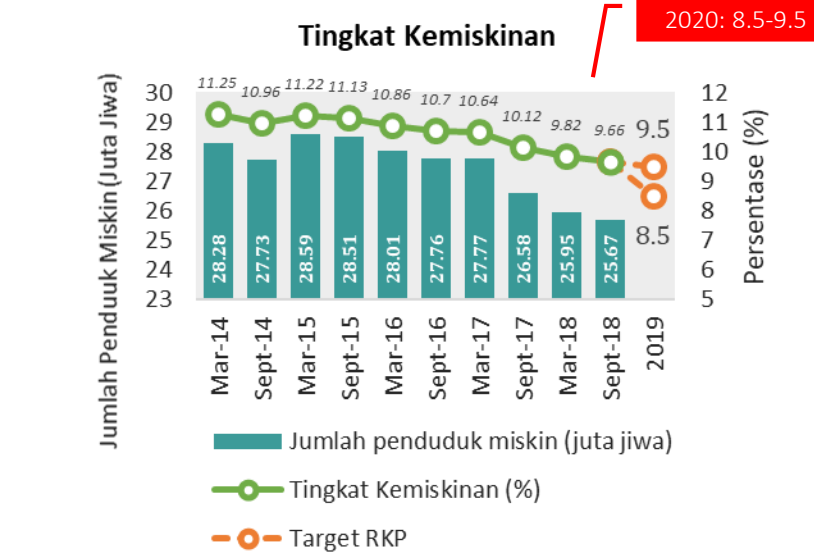
Tahun 2020 akan menjadi Tahapan Jangka Menengah Pertama Menuju Pencapaian Visi Indonesia 2045

Pertumbuhan ekonomi melaju positif didorong oleh penguatan investasi dan konsumsi RT



Uraian	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	RAPBN 2020
Konsumsi RT dan LNPRT	4,8	5,0	5,0	5,1	5,1	4,9
Konsumsi Pemerintah	5,3	-0,1	2,1	4,8	4,9	4,3
PMTB	5,0	4,5	6,2	6,7	5,7	6,0
Ekspor	-2,1	-1,7	8,9	6,5	0,9	3,7
Impor	-6,2	-2,4	8,1	12,0	0,6	3,2
Pertumbuhan Ekonomi	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3

Di tengah volatilitas perekonomian global, pertumbuhan ekonomi terus melaju positif diatas 5 persen, dan ditargetkan 5,3 persen di tahun 2020.



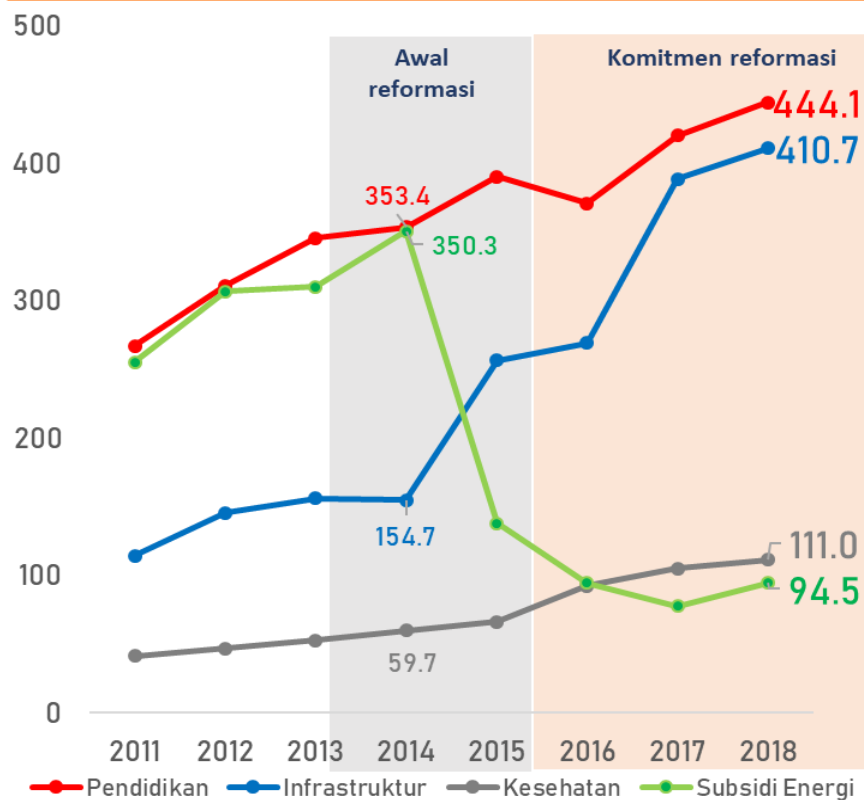
Efisiensi Alokasi

Spending Better (1)

Kementerian Keuangan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah dalam rangka memastikan *spending better*. Pemerintah telah merealokasi dari program kurang produktif dan tidak tepat sasaran. Dan memangkas alokasi belanja operasional, utamanya pada belanja yang digunakan untuk perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan. Hasil dari realokasi tersebut digunakan untuk menambah alokasi berbagai program prioritas Pemerintah

Perbaikan Alokasi Anggaran

Belanja Program Prioritas (Rp Triliun)



Pertumbuhan
2014 - 2018

↑ 25,7%

↑ 165,5%

↑ 85,9%

↓ 73,0%

APBN 2019

Rp492.5T

Rp415.0T

Rp160.T

Rp123.1T

Program Utama

BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN, tunjangan profesi guru, rehab sekolah

Pembangunan dan preservasi jalan, jalur KA, informasi dan telekomunikasi, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah

Distribusi faskes, imunisasi, program untuk ibu hamil dan menyusui, JKN, pencegahan **stunting**

Subsidi lebih tepat sasaran baik BBM, LPG, dan listrik

Belanja Total Subsidi pada tahun 2014 sebesar 3,7 persen dari PDB, berhasil diturunkan menjadi 1,32 persen PDB di tahun 2019.

Pengalihan Belanja Subsidi tersebut untuk meningkatkan anggaran infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan.

Pengalihan anggaran tersebut dilakukan dengan tetap menjaga komitmen Pemerintah untuk menyediakan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan minimal sebesar 20 persen dan 5 persen dari belanja APBN.

Efektivitas Belanja

Spending Better (2)

Pemerintah meningkatkan kualitas belanja dengan memastikan belanja tersalur tepat waktu, tepat jumlah, tepat penerima, tercapai output dan outcome, serta dampak belanja yang dirasakan masyarakat melalui berbagai *tools* monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang melihat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan capaian output



Output Belanja Pusat (Program Strategis)

Tahun 2018



Output Belanja Daerah melalui TKDD

Tahun 2018

- DAK Fisik**
- ❖ 462.093 KM jalan pemda
 - ❖ 36.916,5 Meter Jembatan
 - ❖ 1.732 Unit Embung
 - ❖ 762.967 Unit jaringan irigasi
 - ❖ 953 Unit Perpustakaan
 - ❖ 26.369 Ruang kelas
 - ❖ 475 Unit Ambulan
 - ❖ 91.603 Unit Puskesmas
 - ❖ 1.310 Paket Laboratorium
 - ❖ 178.055 Unit Alkes
 - ❖ 1.178 Unit Sentra UKM
 - ❖ 217 Unit Rumah Khusus
 - ❖ 53.223 Unit Rumah Swadaya



- Dana Desa**
- ❖ 71.653 KM Jalan Desa
 - ❖ 244.011 Unit Penerangan Jalan
 - ❖ 357.666 Unit Jembatan
 - ❖ 131.373 Unit Embung Desa
 - ❖ 392.510 Unit Perpustakaan Desa
 - ❖ 63.958 Orang Bantuan pendidikan
 - ❖ 259.402 Unit PAUD
 - ❖ 63.743 Unit Polindes
 - ❖ 27.496 Unit Posyandu
 - ❖ 591.507 Paket BUMDesa
 - ❖ 48.208 Unit Pasar Desa
 - ❖ 161.544 Unit Rumah Layak Huni

RAPBN 2020

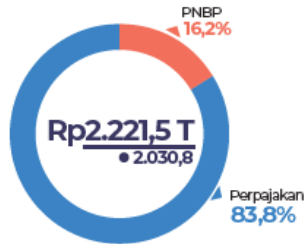
Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”. Tema tersebut diarahkan untuk mendukung tema besar Pemerintah dalam mengakselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

RAPBN 2020

Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

RAPBN 2020 (Rp1000) Outlook APBN 2019 (Rp1000)

Pendapatan Negara

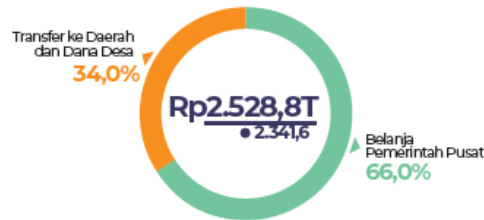


Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah

Perpajakan **1.861,8**
1.643,1

PNPB **359,3**
386,3

Belanja Negara



Peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (*spending better*) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.

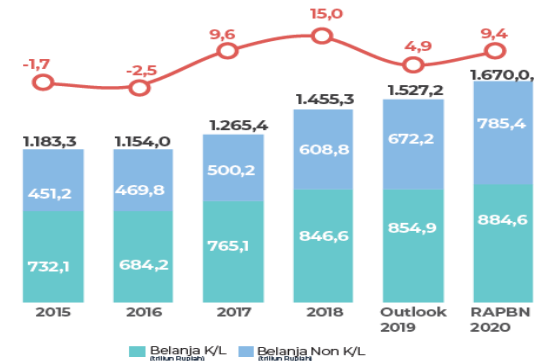
Belanja Pemerintah Pusat **1.670,0**
1.527,2

Transfer ke Daerah dan Dana Desa **858,8**
814,4



Belanja Pemerintah Pusat

diarahkan untuk mendukung pembangunan SDM dan kegiatan strategis lainnya



Pemenuhan inisiatif Presiden dan Kegiatan Strategis Lainnya

- Peningkatan kualitas SDM (KIP Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)
- Pemerataan pembangunan antarwilayah
- Perbaikan kualitas kesehatan
- Percepatan pengembangan 4 destinasi wisata super prioritas
- Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.

Efisiensi

Spending Better → penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, efektivitas bansos

Sinergi

Koordinasi program-program strategis lintas K/L (vokasi, penguatan destinasi wisata, penelitian)



Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif

RAPBN 2020 (Rp1000) Outlook APBN 2019 (Rp1000)

DAK Fisik

72,2 65,9

- Diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik.
- Memperkuat kebijakan afirmasi.
- Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis regulier ke jenis penugasan.
- Penambahan Bidang Sosial dan Transportasi Laut.

DAK Nonfisik

130,6 125,7

- Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah.
- Meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran.
- Menyempurnakan unit cost BOS (naik) dan memutakhirkan data sasaran penerima.

Dana Insentif Daerah

15,0 10,0

- Memperkuat DID sebagai instrument insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.
- Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah.

Dana Desa

72,0 69,8

- Menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
- Meningkatkan porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi.
- Mengoptimalkan peran APIP pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyampaian laporan penyaluran.
- Penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring dan evaluasi dana desa.

Sumber Daya Manusia

Belanja Pendidikan

Dari total rencana belanja Rp2.528 triliun tersebut, alokasi belanja pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun atau 20% dari keseluruhan belanja negara sesuai dengan amanat konstitusi. Belanja pendidikan teralokasi pada Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 169,9 triliun, Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp 306,9 triliun, dan anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp29,0 triliun

Indikator Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia

■ 72,51 ● 71,98

APK Pendidikan SMP/Sederajat

■ 92,73 ● 92,05

APK Pendidikan SMA/Sederajat

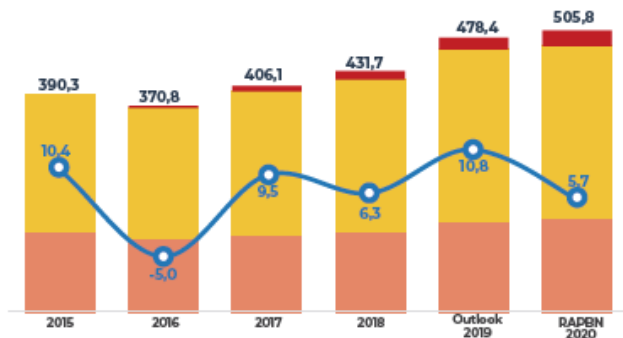
■ 81,52 ● 80,78

Proporsi Pekerja Berkeahlian Menengah & Tinggi (%)

■ 43,0 ● 41,0

Anggaran Pendidikan

▶ diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan



■ RAPEN 2020
● Outlook 2019

Pemerintah Pusat
■ 169,9 ● 153,9

Transfer ke Daerah
■ 306,9 ● 303,5

Pembiayaan (Dana Abadi)
■ 29,0 ● 21,0

Kebijakan

1. Perluasan akses pendidikan dari usia dini sampai dengan pendidikan tinggi

- Melanjutkan bantuan pendidikan melalui KIP dan BOS
- KIP Kuliah (perluasan/penyempurnaan bidik misi)

2. Melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan (melalui Kemen PUPR dan DAK Fisik)

- Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM
- Pendidikan vokasi --> penguasaan skill, entrepreneurship dan ICT sesuai kebutuhan industri
- Kartu Pra kerja

4. Mendukung keberlanjutan pendanaan terkait pendidikan melalui investasi Pemerintah :

- Dana Abadi Pendidikan
- Dana Abadi Penelitian
- Dana Abadi Perguruan Tinggi
- Dana Abadi Kebudayaan

Capaian dan Target Pembangunan Pendidikan

Bantuan Operasional Sekolah (juta jiwa)

2018 56,0
2019 55,8
2020 54,6

Program Indonesia Pintar (juta siswa)

2018 20,4
2019 20,1
2020 20,1

Beasiswa Bidik Misi (ribu mahasiswa)

2018 392,6
2019 463,6
2020 818,1

Penerimaan beasiswa LPDP (mahasiswa)

2018 1.789
2019 6.000
2020 5.000

Pembangunan/Rehab Ruang Kelas (ribu ruang kelas)

2018 62,0
2019 56,9
2020 55,7

1. Anggaran sektor pendidikan yang dikelola Pemerintah Pusat teralokasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Agama, dan beberapa Kementerian atau Lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan.
2. Sementara Belanja Pendidikan Transfer ke Daerah teralokasi pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, dan Bantuan Operasional Sekolah.



KIP Kuliah

diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan *skill* SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan

KIP Kuliah ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMA tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi

Agar setelah lulus dapat langsung bekerja -> jurusan diutamakan vokasi/poltek/sarjana Program Studi Sains dan Teknologi.



Kriteria penerima KIP Kuliah

- Lulusan pemegang KIP.
- Diterima di PTN/PTS/prodi terakreditasi A/B.
- Dari keluarga tidak mampu dan penerima PKH

Sasaran Penerima

Dalam tahun 2020, sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818 ribu mencakup:

Lanjutan Bidik Misi

398
ribu mahasiswa

Penerimaan mahasiswa baru

420
ribu mahasiswa



Biaya hidup

4,2

Juta rupiah/mhs/smt

Bantuan Pendidikan

Biaya Pendidikan

2,4

Juta rupiah/mhs/smt



Kartu Pra Kerja

Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (*skilling* dan *re-skilling*) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja.

Bertujuan untuk peningkatan produktivitas pencari kerja, dengan inovasi implementasinya melalui platform (digital) bagi pencari kerja (khususnya anak muda) dan yang sedang bekerja (alih profesi/korban PHK)

target
2 juta peserta
• Digital: 1,5 juta • Reguler: 0,5 juta

Total anggaran 2020

Rp10 T



Skilling

Sasaran : pencari kerja *fresh graduate*
Tujuan : *skill adjustment*, pembekalan *vocational skill* untuk bekerja
Outcome : mengurangi penganggur

Re-Skilling

Sasaran : alih profesi, pekerja ter-PHK, atau berpotensi ter-PHK
Tujuan : pembekalan *vocational skill* yang berbeda/ baru untuk alih profesi/ wirausaha
Outcome : mencegah pengangguran kembali

Desain Implementasi

Digital

Pelatihan + insentif

Peserta memilih jenis pelatihan melalui platform digital (GoJek, Tokopedia, Jobstreet dll).
Pelatihan disediakan oleh swasta*

▶ Pelatihan *Online* (e-learning) dan *Offline* (tatap muka)

* lembaga pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan PMO

Reguler

Pelatihan + Sertifikasi + Insentif

Pelatihan dan Sertifikasi di LPK Pemerintah (termasuk BLK), LPK Swasta, dan TC Industri*

▶ Pelatihan *Offline* (tatap muka)

* tahap pengembangan selanjutnya

Dana Abadi Pendidikan

Riset memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memprioritaskan pada kegiatan riset yang terkait dengan sector sector yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar. Namun fokus riset yang akan dilakukan tetap berpedoman pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).

- Dana abadi penelitian, yang mulai dialokasikan tahun 2019, hasil kelolaannya diharapkan dalam mendukung pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing SDM.
- Pengalokasian dana abadi penelitian sejalan dengan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yang mengamanatkan pendanaan untuk keg penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang terintegrasi.
- **Dalam RAPBN tahun 2020, besaran investasi Pemerintah dalam bentuk dana abadi penelitian direncanakan sebesar Rp5.000,0 miliar.**

Kebijakan:

- a) Penguatan penelitian dengan sinergi lintas K/L.
- b) Pemerintah mengembangkan *research power-house*, melalui peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM iptek, pengelolaan data kekayaan hayati dan intelektual, serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri

Dana Abadi Perguruan Tinggi

Saat ini Pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitasnya menjadi *world class university* sehingga mampu mendorong mahasiswa untuk bersaing dalam ranah global yang memang dipersiapkan secara matang untuk menghadapi tantangan globalisasi. Hasil investasi dana abadi ini nantinya akan dipergunakan untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam mewujudkan perguruan tinggi di Indonesia menuju *World Class University*.

- **Dalam RAPBN tahun 2020 Pemerintah juga mulai mengalokasikan investasi dalam bentuk dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp5.000,0 miliar.**
- Hasil kelolaan dari dana abadi perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan World Class University melalui pengembangan SDM serta sarana dan prasarana pada beberapa perguruan tinggi terpilih di Indonesia

Dana Abadi Kebudayaan

Kekayaan budaya tersebut jika dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Namun, kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam RAPBN tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan dana abadi kebudayaan yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya Selain itu, pemanfaatan hasil kelolaan dana abadi kebudayaan juga akan digunakan untuk memfasilitasi program atau kegiatan dalam kerangka pemajuan kebudayaan dalam ekosistem sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya

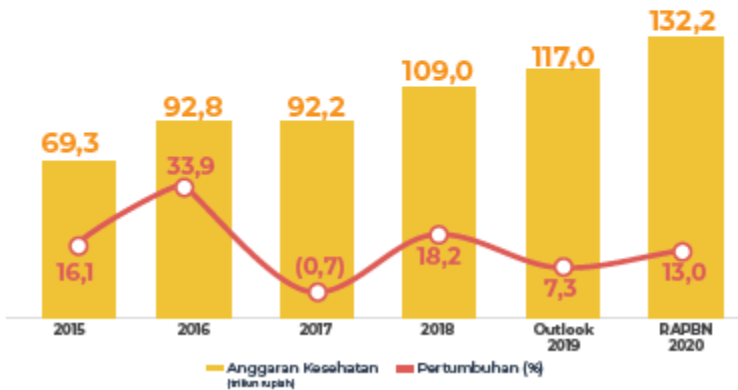
- **Dalam RAPBN tahun 2020 Pemerintah juga mulai mengalokasikan investasi dalam bentuk dana abadi kebudayaan sebesar Rp1.000,0 miliar.**
- Hasil kelolaan dari investasi dana abadi kebudayaan diharapkan dapat mendukung upaya pemajuan kebudayaan pada 10 objek yang mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Sumber Daya Manusia

Belanja Kesehatan

Anggaran Kesehatan

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan *stunting*



RAPBN 2020 (bilion rupiah) Outlook 2019 (bilion rupiah)
Melalui Belanja Pusat
■ 97,2 ● 86,0

Melalui Transfer ke Daerah
■ 34,9 ● 31,0

Capaian dan Target Pembangunan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas



Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa



Sertifikasi obat dan makanan



Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses - jiwa

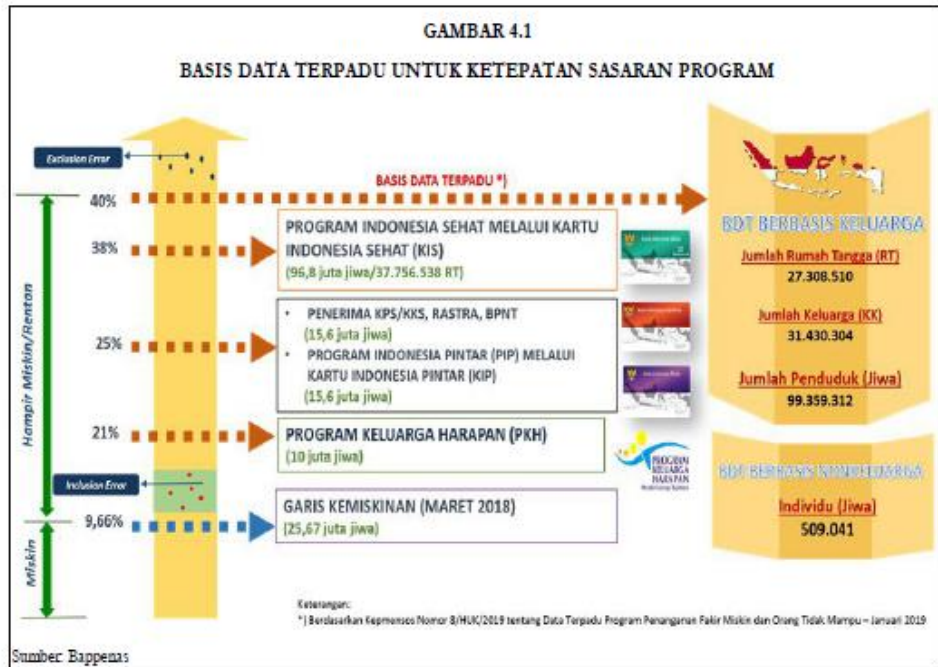


KEBIJAKAN

- Refocusing anggaran kesehatan
 - mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah penggalan pajak baru (*negative externalities*) untuk kesehatan
 - penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS
- Penguatan anggaran kesehatan untuk program *early childhood*
 - meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita • akselerasi penurunan *stunting*
- Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan
 - harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan faskes • mendorong skema KPBU
- Peningkatan level efektivitas program JKN
 - percepatan peningkatan kepesertaan non PBI; peningkatan kualitas layanan kesehatan; *strategic purchasing* untuk efisiensi biaya manfaat; reviu besaran iuran PBI dan non PBI.

Sumber Daya Manusia

Belanja Pengentasan Kemiskinan



Belanja K/L dalam rangka penguatan program perlindungan sosial diarahkan untuk penurunan tingkat kemiskinan.

1. Penguatan PKH
2. Transformasi program bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra) menjadi kartu sembako, serta perluasan bahan pangan yang dapat dibeli
3. Mempertajam sasaran penerima dengan pemanfaatan basis data terpadu

Capaian Output Penting 2015-2019:

- (1) Sasaran PKH diikuti dengan peningkatan manfaat pada tahun 2019 pada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- (2) Pemberian bantuan pangan kepada 15,6 juta KPM;

Target 2019

- (1) Pelaksanaan PKH dengan target penyaluran kepada 10 juta KPM dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan
- (2) Pemberian kartu sembako sebagai bentuk penyempurnaan dari bantuan sosial pangan kepada 15,6 juta KPM dengan meningkatkan indeks bantuan dari Rp110.000/KPM/perbulan menjadi Rp150.000/KPM/perbulan, dan penyaluran PKH bagi 10 juta KPM



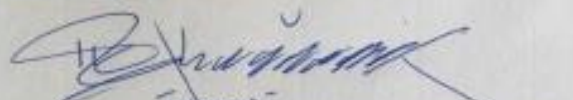
- a. PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Program yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007.
- b. Pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan program PKH dengan mengalokasikan Rp29.129,6 miliar bagi 10,0 juta KPM.
- c. Hal ini diikuti dengan perbaikan dukungan basis data terpadu, kemudahan akses layanan keuangan digital, dan peningkatan kapasitas dan kualitas pendamping PKH.

Visi Indonesia dan Impian Indonesia 2015 - 2085

4 Impian Indonesia 2015-2085 11

1. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.
2. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
3. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peralihan dunia.
4. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi.
5. Terlanggunya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.
6. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik.
7. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Merantau, 30 Desember 2015


Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia ke-7

*melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia*

memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa

*ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial*

**VISI
INDONESIA**

BERDAULAT

MAJU

ADIL DAN MAKMUR

Visi Indonesia

2045 Indonesia Maju

Indonesia mempunyai visi besar kedepan. Kita ingin di tahun 2045 Indonesia menjadi negara ekonomi terkuat keempat di dunia, dengan nilai PDB mencapai US\$ 7,3 triliun dan pendapatan per kapita US\$ 25.000 sehingga terhindar dari perangkap pendapatan kelas menengah atau middle income trap.

Kita ingin mencapai “2045 Nol” yaitu tingkat kemiskinan yang mendekati nol (0,02%) dan pemerataan kesejahteraan dengan rasio gini mendekati 0,34.



2020-2030

Penguatan Pondasi
Penguatan Daya Saing

Pemerintah ditantang untuk merespon tantangan demografi melalui reformasi di segala bidang yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui konsumsi, investasi, dan produksi serta penguatan daya saing.



2031-2035

Transisi
Memperkokoh Daya Saing

Upaya yang ditempuh adalah peningkatan kualitas SDM agar semakin berdaya saing, mendorong infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dioptimalkan dengan optimal sehingga memberikan peningkatan produktivitas dan mendukung transformasi industri, serta program perlindungan sosial yang komprehensif sudah mulai diimplementasikan.



2036-2045

Indonesia Maju
Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur

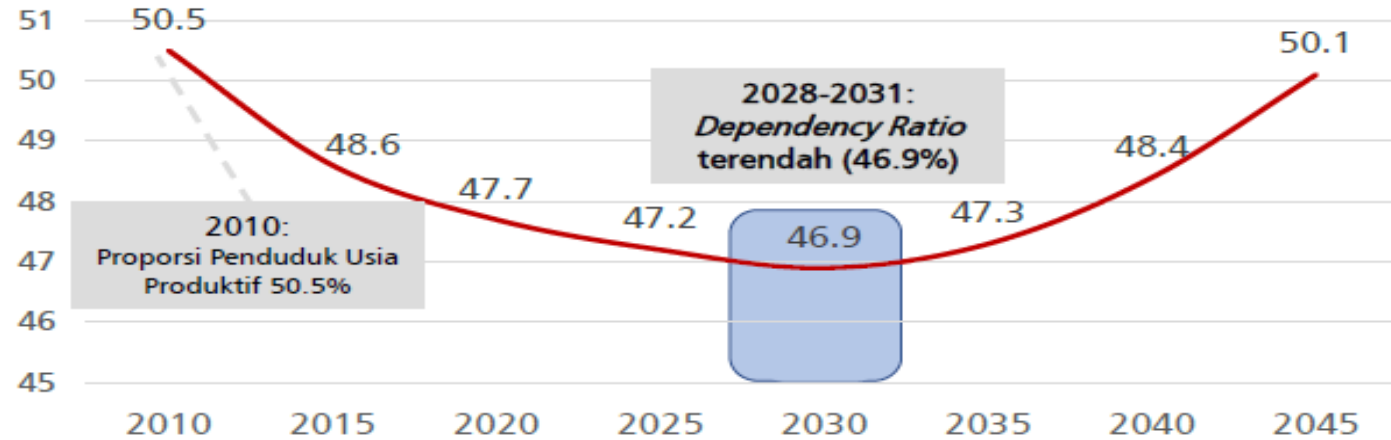
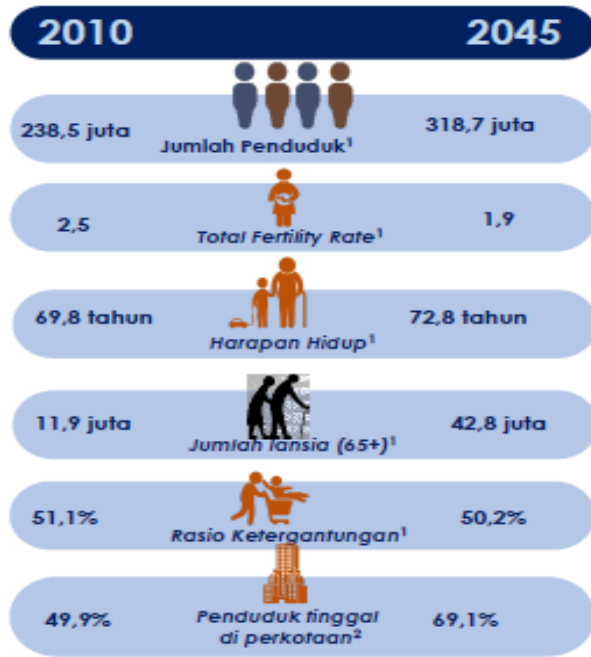
Indonesia diharapkan telah keluar dari jebakan pendapatan menengah sehingga Indonesia telah siap menuju negara maju, mandiri, adil dan makmur.

Bonus Demografi



Demografi Indonesia

Rasio ketergantungan mencapai titik terendah pada periode 2028-2031, peluang bonus demografi dan bonus demografi kedua¹



Jumlah penduduk usia produktif Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara²



KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Pembangunan berpusat pada manusia
2. Pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi kedua
3. Pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi
4. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang seimbang
5. Perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan
6. Peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam pembangunan internasional
7. Terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antar generasi

Sumber Data:

¹ Perhitungan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2045

² UN Population Prospect 2010-2085